

PENGARUH INVESTASI, ANGKATAN KERJA DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI SUMATERA BARAT

Yulina Eliza

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perdagangan Padang

Email : yulinaeliza@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris sejauhmana investasi, angkatan kerja, pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka atau bisa diangkakan, analisis statistik lebih tepat digunakan pada data ini. Analisis statistik terdiri dari statistik deskriptif dan statistik inferensial. Analisis deskriptif di sini dibantu dengan menggunakan tabel dan grafik. Secara inferensial akan digunakan pendekatan hasil perhitungan model regresi linear berganda, termasuk uji statistik. Berdasarkan hasil penelitian, ternyata secara parsial Investasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Angkatan kerja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah (rutin dan pembangunan) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Begitu pula secara simultan (bersama-sama) Investasi, Angkatan Kerja dan Pengeluaran Pemerintah signifikan mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat.

Kata Kunci : Investasi, angkatan kerja, pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi

LATAR BELAKANG PENELITIAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya. Dan pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator penting guna menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu syarat yang diperlukan dalam proses pembangunan (Meier, 1989). Sebelum krisis ekonomi 1997 terjadi, Indonesia sempat menikmati pertumbuhan ekonomi tinggi. Sayangnya, krisis keuangan pada tahun 1997-1998 ditambah krisis-krisis lain, telah memperlemah sistem keuangan dan pemerintahan (*governance*) sehingga menurunkan kegiatan perekonomian Indonesia secara umum. Krisis ketenagakerjaan yang telah terjadi semakin diperburuk oleh adanya krisis moneter tersebut. Krisis moneter meluas menjadi multi krisis yang mencakup krisis ekonomi, politik, keamanan, pemerintahan, hukum, kepercayaan, sosial, bahkan krisis moral (*moral hazard*) sehingga *good governance* semakin jauh, yang secara keseluruhan menurunkan dan memperparah krisis ketenagakerjaan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat drastis dari 7,8 persen tahun 1996 menjadi 4,7 persen pada tahun 1997, kemudian mengalami penurunan pada tahun 1998 yakni sebesar 13,13 persen, dan 1,29 persen pada tahun 1999.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat terlihat dari pertumbuhan PDRB harga konstan (2000=100). Seperti yang terlihat pada Tabel 1 dapat diketahui bahwa selama kurun waktu 2007-2010 nilai PDRB Provinsi Sumatera Barat masih jauh lebih rendah dibanding PDRB Nasional dan tiga provinsi lainnya di Sumatera (Sumatera Utara, Riau dan Sumatera Selatan).

Tabel 1
Perbandingan PDRB Sumatera Barat dengan PDB Nasional
dan PDRB Empat Provinsi di Pulau Sumatera (Miliar Rupiah)

Tahun	2007	2008	2009	2010
Sumatera Utara	99 792 (6,90)	106 172 (6,39)	111 561 (5,08)	118 641 (6,35)
Riau	86 213 (3,41)	91 085 (5,65)	93 786 (2,97)	97 702 (4,18)
Sumatera Selatan	55 262 (5,84)	58 065 (5,07)	60 453 (4,11)	63 736 (5,43)
Sumatera Barat	32 913 (6,34)	35 177 (6,88)	36 683 (4,28)	38 860 (5,93)
Nasional	1 878 725 (6,28)	1 999 544 (6,43)	2 094 316 (4,74)	2 221 604 (6,08)

Sumber : BPS, Indikator Sosial Ekonomi Wilayah se-Sumatera Barat Tahun 2011

Catatan : (...) pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Barat pada 2009 yang tercatat sebesar 4,28 persen mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan yang terjadi pada 2008 yang sempat mencapai 6,88 persen. Berarti terjadi perlambatan yang cukup besar sekitar 37,79 persen. Dibanding tahun 2009, pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat lebih tinggi mencapai 5,93 persen, tetapi masih rendah dibanding tahun 2008. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatera Barat yang masih rendah serta pertumbuhannya yang berada di bawah nilai dan pertumbuhan ekonomi nasional dan beberapa Provinsi lain di Sumatera. Merupakan masalah yang menarik untuk dikaji mengingat sumber daya alam dan prasarana penunjang yang relatif sama dibanding provinsi lain, bahkan letak Provinsi Sumatera Barat berada di tengah dari pulau Sumatera, dinilai memiliki arti strategis tersendiri.

Melihat kondisi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat seperti diuraikan di atas, maka peningkatan modal berupa investasi diharapkan berperan penting untuk meningkatkan perekonomian. Oleh karena itu, baik pihak pemerintah maupun pihak swasta seharusnya berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penghimpunan dana yang diarahkan pada kegiatan ekonomi produktif yaitu dengan meningkatkan investasi.

Tenaga kerja juga merupakan suatu faktor yang mempengaruhi output suatu daerah. Angkatan kerja yang besar akan terbentuk dari jumlah penduduk yang besar. Namun pertumbuhan penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang buruk terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Todaro (2000) pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin jauh.

Selain angkatan kerja, pengeluaran pemerintah juga diduga memiliki pengaruh yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan PDRB, sebagai tolok ukur pertumbuhan suatu ekonomi regional juga tidak bisa lepas dari peran pengeluaran pemerintah di sektor layanan publik. Pengeluaran pemerintah daerah diukur dari total pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang dialokasikan dalam anggaran daerah. Semakin besar pengeluaran pemerintah daerah yang produktif maka semakin tinggi tingkat perekonomian suatu daerah (Wibisono, 2003).

KAJIAN PUSTAKA

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Arsyad (1999) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto/Pendapatan Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.

Menurut (Arsyad,1999) ada tiga unsur pokok dari sistem produksi suatu negara berdasarkan teori klasik: 1) Sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat dimana jumlah sumber daya alam yang tersedia mempunyai batas maksimum bagi pertumbuhan suatu perekonomian, 2) Sumber daya insani (jumlah penduduk) merupakan peran pasif dalam proses pertumbuhan output, maksudnya jumlah penduduk akan menyesuaikan dengan kebutuhan akan tenaga kerja, 3) Stok modal merupakan unsur produksi yang sangat menentukan tingkat pertumbuhan output.

Secara umum teori pertumbuhan neoklasik beranggapan bahwa pertumbuhan output dihasilkan satu atau lebih dari tiga faktor, yaitu: 1) kenaikan kuantitas dan kualitas tenaga kerja (melalui pertumbuhan penduduk dan pendidikan); 2) kenaikan modal (melalui tabungan dan investasi); 3) perbaikan teknologi.

Menurut Solow dan Swan, bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung kepada penambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja dan akumulasi modal) serta tingkat kemajuan teknologi. Dengan kata lain, sampai dimana perekonomian akan berkembang bergantung pertambahan penduduk, akumulasi modal dan kemajuan teknologi (Arsyad, 1999).

Investasi

Investasi adalah pengeluaran-pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan atau mempertahankan persediaan barang modal (*capital stock*) terdiri dari pabrik, mesin kantor, dan produk-produk tahan lama lainnya (Dornbusch dan Fischer, 2004).

Investasi adalah penambahan barang modal secara netto yang positif. Investasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu investasi riil dan investasi finansial. Yang dimaksud dengan investasi riil adalah investasi terhadap barang-barang tahan lama (barang-barang modal) yang akan digunakan dalam proses produksi. Sedangkan investasi finansial adalah investasi terhadap surat-surat berharga, misalnya pembelian saham, obligasi, dan surat bukti hutang lainnya. Pertimbangan-pertimbangan utama yang perlu dilakukan dalam melakukan (memilih) suatu jenis investasi riil adalah tingkat bunga pinjaman yang berlaku, tingkat pengembalian (*rate or return*), dari barang modal, dan prospek (harapan berkembang) proyek investasi (Guritno, 1998: 81).

Dalam praktiknya, dalam usaha untuk mencatat nilai penanaman modal yang dilakukan dalam suatu tahun tertentu, yang digolongkan sebagai investasi (atau pembentukan modal atau penanaman modal) meliputi pengeluaran-pengeluaran sebagai berikut : 1) Pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan, 2) Pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik dan bangunan-bangunan lainnya, dan 3) Pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun perhitungan pendapatan nasional.

Angkatan Kerja

Secara umum, tenaga kerja (*manpower*) didefinisikan sebagai penduduk yang berada pada usia kerja (15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Dengan demikian semua penduduk yang telah berumur 15 tahun keatas dapat digolongkan sebagai tenaga kerja. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan. Berlakunya Undang-Undang ini mulai tanggal 1 Oktober 1998.

Pemilihan umur 15 tahun sebagai batas umur minimal adalah berdasarkan kenyataan penduduk umur 15 tahun di Indonesia sudah bekerja atau mencari kerja terutama di desa-desa. Demikian juga Indonesia tidak menetapkan batasan umur maksimal tenaga kerja karena belum adanya jaminan sosial nasional. Hanya sebagian kecil penduduk yang menerima tunjangan hari tua, yaitu pegawai negeri dan sebagian pegawai swasta. Bagi golongan ini pun pendapatan yang diterima tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga mereka yang telah mencapai umur pensiun masih tetap bekerja untuk mencukupi kebutuhannya, sehingga mereka tetap digolongkan sebagai tenaga kerja (Simanjuntak, 1998). Tenaga kerja (*manpower*) terdiri dari angkatan kerja (*labor force*) dan bukan angkatan kerja (*non labor force*).

Angkatan kerja (*labor force*) adalah bagian penduduk yang mampu dan bersedia melakukan pekerjaan. Arti dari mampu adalah mampu secara fisik dan jasmani, kemampuan mental dan secara yuridis mampu serta tidak kehilangan kebebasan untuk memilih dan melakukan pekerjaan serta bersedia secara aktif maupun pasif melakukan dan mencari pekerjaan (Sumarsono, 2004).

Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesoebroto, 1993; 169).

Perkembangan pengeluaran pemerintah dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahapan-tahapan pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, menurut mereka rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional relatif besar. Hal ini dikarenakan pada tahap ini persentase Investasi swasta pemerintah terhadap total Investasi swasta besar sehingga pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya. (Dumairy, 1997).

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, Investasi swasta pemerintah tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Namun pada tahap ini peranan Investasi swasta sudah semakin membesar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik. Pemerintah juga harus melindungi buruh yang berada dalam posisi yang lemah agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. (Basri, 2005)

Dalam satu proses pembangunan menurut Musgrave, rasio Investasi swasta terhadap GNP semakin besar. Tetapi rasio Investasi swasta pemerintah terhadap

GNP akan semakin kecil. Sementara itu, Rostow berpendapat bahwa pada tahap lanjut pembangunan terjadi peralihan aktivitas pemerintah dari penyediaan prasarana ekonomi ke pengeluaran untuk layanan sosial seperti program kesejahteraan hari tua, program pendidikan, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya. (Dumairy, 1997)

Wagner mengemukakan pendapatnya bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Hukum Wagner dikenal dengan "The Law of Expanding State Expenditure". Dasar dari hukum tersebut adalah pengamatan empiris dari negara-negara maju (Amerika Serikat, Jerman, Jepang). Dalam hal ini Wagner menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar, terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan dari kajian teori di atas maka dapat dikemukakan kerangka konseptual sebagai berikut:

a. Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan investasi-investasi baru sebagai stok modal seperti. Dengan adanya semakin banyak tabungan yang kemudian diinvestasikan, maka semakin cepat terjadi pertumbuhan ekonomi.

Dengan semakin besarnya investasi diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, dimana peningkatan modal sangat berperan penting untuk meningkatkan perekonomian. Oleh karena itu, baik investasi pemerintah maupun investasi swasta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penghimpunan dana yang diarahkan pada kegiatan ekonomi produktif yaitu dengan menggenjot investasi.

b. Pengaruh Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat.

Jumlah tenaga kerja yang lebih besar akan menambah tingkat produksi. Jumlah tenaga kerja yang besar dapat berarti menambah jumlah tenaga produktif. Input tenaga kerja melalui keterampilan, pengetahuan dan disiplin merupakan elemen penting dalam pertumbuhan ekonomi. Suatu negara atau daerah, walaupun mampu membeli berbagai peralatan canggih, tetapi tidak bisa mempekerjakan tenaga kerja yang terampil dan terlatih tidak akan dapat memanfaatkan barang-barang modal tersebut secara efektif.

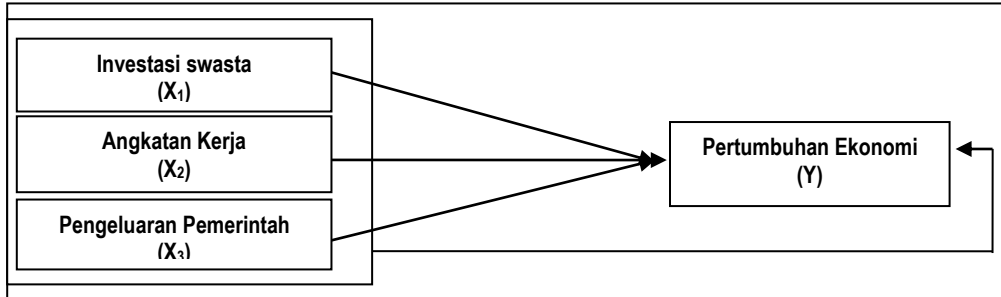
Dengan semakin banyaknya jumlah tenaga kerja yang tersedia, berarti dapat menambah jumlah tenaga kerja produktif melalui tenaga kerja yang terampil sehingga produksi akan meningkat, yang berarti akan meningkatkan pula PDRB. Dengan kata lain, jumlah tenaga kerja mempunyai hubungan yang positif dengan pertumbuhan ekonomi.

c. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat.

Peran pemerintah daerah dalam pertumbuhan ekonomi adalah dengan mewujudkan pembangunan ekonomi daerah dengan mendorong perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Peran pemerintah daerah dapat dilihat dari besar kecilnya pengeluaran pemerintah. Semakin besar anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk pembangunan, akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih bergairah.

Hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi adalah positif. Jika pengeluaran pemerintah meningkat, maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat, dan sebaliknya jika pengeluaran pemerintah rendah

maka pertumbuhan ekonomipun akan rendah. Besarnya investasi, jumlah angkatan kerja dan pengeluaran pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat selama periode pengamatan 1981-2010 dijadikan variabel-variabel bebas yang secara parsial atau bersama-sama diduga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat. Skema hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan variabel-variabel yang mempengaruhinya dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1

Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Variabel yang Mempengaruhinya

Hipotesis

1. Angkatan kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat
2. Pengeluaran rutin berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat
3. Pengeluaran pembangunan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat
4. Angkatan kerja, pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat

METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dari instansi, lembaga atau sumber-sumber lain yang relevan. data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kuantitatif dengan analisa regresi berganda.

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka atau bisa diangkakan, analisis statistik lebih tepat digunakan pada data ini. Analisis statistik terdiri dari statistik deskriptif dan statistik inferensial. Analisis deskriptif di sini dibantu dengan menggunakan tabel dan grafik. Secara inferensial akan digunakan pendekatan hasil perhitungan model regresi linear berganda, termasuk uji statistik. Penggunaan model regresi linear berganda disini dimaksudkan untuk menganalisis dan membuktikan apakah pengaruh antara variabel independen (investasi, angkatan kerja dan pengeluaran pemerintah) signifikan terhadap variabel dependen (PDRB).

Uji Asumsi Klasik

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dapat diketahui dengan Uji Durbin-Watson (DW Test) dengan ketentuan sebagai berikut:

- $DW < dL$ = terdapat atokorelasi positif

- $dL < DW < dU$ = tidak dapat disimpulkan (*inconclusive*)
- $dU > DW > 4-dU$ = tidak terdapat autokorelasi
- $4-dU < DW < 4-dL$ = tidak dapat disimpulkan (*inconclusive*)
- $DW > 4-dL$ = terdapat autokorelasi negatif

Uji Multikoleniaritas

Uji ini bertujuan untuk melihat korelasi sesama variabel bebas. Apabila terdapat korelasi yang tinggi sesama variabel bebas, maka salah satu diantaranya dieliminir (dikeluarkan dari analisis regresi berganda).

Jika $r_{xy} > r$ tab atau $-r_{xy} < -r$ tab, maka terdapat kasus multikolinearitas

Jika $r_{xy} < r$ tab atau $-r_{xy} > -r$ tab, maka tidak terdapat kasus multikolinearitas

Uji Normalitas

Untuk mengetahui normal atau tidaknya sebaran data yang diteliti. Jika nilai χ^2 -hitung < nilai χ^2 -tabel, maka dapat disimpulkan bahwa data yang diteliti adalah berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai χ^2 -hitung > nilai χ^2 -tabel, maka data yang diteliti tidak berdistribusi normal.

Pengujian Variabel

Dalam penelitian ini penulis menggunakan rumus Regresi linear berganda dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

Dimana :

Y = pertumbuhan ekonomi

β_0 = konstanta

β_1 = koefisien regresi variabel investasi

β_2 = koefisien regresi variabel angkatan kerja

β_3 = koefisien regresi variabel pengeluaran pemerintah

X_1 = investasi, X_2 = angkatan kerja, X_3 = pengeluaran pemerintah

(1) Uji Hipotesis Secara Sendiri-sendiri (Uji t)

Nilai t hitung dicari dengan menggunakan rumus :

$$t_0 = \frac{b_i}{sb_i}$$

dimana :

t_0 = nilai t hitung

b_i = koefisien regresi

sb_i = standar deviasi atas koefisien regresi X_i

Dengan kriteria pengujian :

1. Jika t hitung \geq t tabel maka H_0 ditolak, artinya variabel independen X_i berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika t hitung < t tabel maka H_0 diterima, artinya variabel independen X_i tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

(2) Pengujian Secara Keseluruhan (Uji F)

Nilai F dapat diperoleh dengan perhitungan (pengolahan dengan SPSS) dibandingkan dengan F- tabel. Nilai hitung dicari dengan rumus :

$$F = \frac{JK(reg) / k}{JK(S) / (n - k - 1)}$$

dimana :

F	=	nilai F hitung
JK (reg)	=	jumlah kuadrat regresi
JK (S)	=	jumlah kuadrat sisa
N	=	banyaknya sampel

Dengan kriteria :

1. Jika F hitung \geq F tabel maka H_0 ditolak, artinya semua variabel independen berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen.
2. Jika F hitung $<$ F tabel maka H_0 diterima, artinya semua variabel independen tidak berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Koefisien Determinan (Uji R^2)

Nilai koefisien determinasi (R^2) ini mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat (Y) yang dapat diterangkan oleh variabel bebas (X). Bila koefisien determinasi sama dengan 0 ($R^2 = 0$) artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. Sementara bila $R^2 = 1$, artinya variasi Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X. Dengan kata lain bila $R^2 = 1$ maka semua titik pengamatan berada tepat pada garis regresi. Dengan demikian baik atau buruknya suatu persamaan regresi ditentukan oleh R^2 nya yang mempunyai nilai antara nol dan satu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Estimasi

Untuk membuktikan hipotesis yang diajukan, digunakan pendekatan OLS (*Ordinal Least Square*) atau kuadrat terkecil. Hasilnya sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	t	Sig
(Constant)	-5,719	0,000
Investasi	5,190	0,000
Tenaga Kerja	11,627	0,000
Pengeluaran Pemerintah	9,679	0,000

Dependent Variable: PDRB

Nilai koefisien regresi masing-masing variabel di atas dapat dituliskan ke dalam persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = -12.184,27 + 0,187 X_1 + 0,550X_2 + 0,375 X_3$$

b. Uji Hipotesis

(1) Pengujian Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah "Investasi (X_1), berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) di Provinsi Sumatera Barat" . Hasil pengolahan data diperoleh nilai koefisien regresi dari variabel investasi (X_1) adalah sebesar 0,187 dengan nilai probability sebesar 0,000. Hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Barat.

(2) Pengujian Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah "Angkatan kerja (X_2) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) di Provinsi Sumatera

Barat” . Hasil pengolahan data diperoleh nilai koefisien regresi dari variabel angkatan kerja (X_2) adalah sebesar 0,550 dengan nilai probability sebesar 0,000 yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Barat.

(3) Pengujian Hipotesis Ketiga

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah “Pengeluaran pemerintah berpengaruh (X_3) signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) di Provinsi Sumatera Barat” . Hasil pengolahan data dengan analisis regresi linear berganda diketahui bahwa nilai koefisien regresi dari variabel pengeluaran pemerintah (X_3) adalah sebesar 0,375 dengan nilai probability sebesar 0,000. Hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Barat.

(4) Pengujian Hipotesis Keempat

Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah “investasi (X_1), angkatan kerja (X_2), dan pengeluaran pemerintah (X_3) secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) di Provinsi Sumatera Barat” . Hasilnya diperlihatkan pada table 2 berikut ini:

Tabel 2
Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2210970541,944	3	736990180,648	474,271	0,000
Residual	40402529,651	26	1553943,448		
Total	2251373071,595	29			

a Predictors: (Constant), P_PEM, INV, T_KERJA

b Dependent Variable: PDRB

Sumber : Pengolahan data primer, 2011

Dari Tabel 2 di atas diketahui bahwa nilai F hitung adalah sebesar 474,271 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari angkatan kerja, pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota provinsi Sumatera Barat.

Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Uji R^2 (*R-Square*) digunakan untuk mengukur seberapa besar proporsi variasi dari variabel independen secara bersama-sama dalam mempengaruhi variabel dependen. Dalam penelitian ini digunakan Adjusted *R-Square* karena variable bebasnya lebih dari 2 (dua) buah variable.

Tabel 3
Hasi Uji Determinasi

Model	R	R Square	Adj R Square	Standar Error
1	0,991	0,982	0,980	1,928

a Predictors: (Constant), P_PEM, INV, T_KERJA

b Dependent Variable: PDRB

Sumber : Pengolahan data primer, 2011

Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui bahwa nilai Uji R^2 (*R-Square*) adalah sebesar 0,980, hal ini berarti besarnya pengaruh dari investasi, angkatan kerja, dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 98 % dan sisanya sebesar 2 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk ke dalam model penelitian.

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari investasi terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) di Provinsi Sumatera Barat. Koefisien dari variabel investasi adalah sebesar 0,187 dan nilai tersebut adalah positif maka peningkatan realisasi investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Barat secara signifikan. Jika realisasi investasi naik 1 persen, maka pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat naik 0,187 persen. Hal ini menjadi tantangan bagi pihak birokrat Propinsi Sumatera barat, untuk mengoptimalkan peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal dalam negeri (PMDN) dengan memberikan iklim investasi yang lebih kondusif. Beberapa diantaranya dengan melakukan efisiensi perijinan atau regulasi kebijakan di bidang investasi. Hal ini dapat dijelaskan bahwa sejak krisis aliran modal dalam negeri merosot tajam (1987-1988) sedangkan Penanaman Modal Asing pada masa krisis 1987-1988 tidak begitu terpengaruh malahan meningkat drastis sebesar 812%) pada tahun 1987 sedangkan tahun 1988 Penanaman Modal Asing Provinsi Sumatera Barat meningkat 50 %.

2. Pengaruh Angkatan kerja terhadap Pertumbuhan ekono di Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) di Provinsi Sumatera Barat. Dimana dengan terjadinya peningkatan angkatan kerja akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Y) di Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan temuan penelitian ini maka diketahui bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Y) di Provinsi Sumatera Barat perlu ditingkatkan jumlah angkatan kerja karena dengan adanya jumlah angkatan kerja khususnya terdidik dan terlatih akan meningkatkan produktivitas. Sehingga meningkatkan jumlah produksi atau output, dengan demikian juga akan meningkatkan nilai tambah, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Y) di Provinsi Sumatera Barat.

3. Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari pengeluaran rutin dan pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) di Provinsi Sumatera Barat. Dari temuan penelitian ini dapat diketahui bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Y) di Provinsi Sumatera Barat perlu ditingkatkan jumlah anggaran untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Khususnya untuk pengeluaran pembangunan karena dengan semakin besarnya jumlah anggaran pengeluaran pembangunan akan meningkatkan produktivitas. Dengan demikian akan meningkatkan jumlah produksi atau output. Kondisi ini juga akan meningkatkan nilai tambah, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Y) di Provinsi Sumatera Barat.

4. Pengaruh investasi, angkatan kerja, dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari investasi, angkatan kerja, pengeluaran rutin/pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) di Provinsi Sumatera Barat. Dimana dengan terjadinya peningkatan investasi, angkatan kerja, pengeluaran rutin/pembangunan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Y) di Provinsi Sumatera Barat.

SIMPULAN

1. Secara parsial Investasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Angkatan kerja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah (rutin dan pembangunan) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat
2. Secara simultan (bersama-sama) Investasi, Angkatan Kerja dan Pengeluaran Pemerintah signifikan mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, 2003, *Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka Tahun*, (berbagai tahun penerbitan, BPS Provinsi Sumatera Barat.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumbar (berbagai penerbitan)
- Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol 15, No.2
- Mangkoesebroto, Guritno. 1998. *Ekonomi Publik*, BPFE, Edisi 3, Yogyakarta.
- Mankiw, N Gregory, 1997, *Macroeconomics*, Worth Publisher Inc, New York.
- Miller, Stephen M and Frank Russek S. 1997. Fiscal Structure and Economic Growth at the State and Local Level, *Public Finance Review*, Vol. 25 No. 3, 213-237.
- Mudradjad Kuncoro, 1997, *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan*, Yogyakarta, YKPN
- Mankiw, N Gregory, 1997, *Macroeconomics*, Worth Publisher Inc, New York.
- Miller, Stephen M and Frank Russek S. 1997. Fiscal Structure and Economic Growth at the State and Local Level, *Public Finance Review*, Vol. 25 No. 3, 213-237.
- Nicholson, W, 1994. *Teori Ekonomi Mikro Prinsip Dasar dan Pengembangannya*, Rajawali Pers.
- Siti Aisyah T Rahayu, 2000, *Peranan Sektor Publik Lokal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia*, Tesis MEP UGM Yogyakarta (Tidak dipublikasikan).
- Todaro, M.P. 1997. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, terjemahan, cetakan keempat, Jakarta, Ghalia, Indonesia